

Kebijakan pendidikan Pakubuwana X dan pengaruhnya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta tahun 1893-1939

Mulyanto^{1*}, Didin Saepuddin², Adian Husaini³ & Tiar Anwar Bachtiar⁴

¹Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

³Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Garut

*mulyanto8000@yahoo.com

Abstract

The Educational Policy of Pakubuwana X in Surakarta in 1893-1939 was influenced by the social politic condition at that time. Such as the born of etic politic, the appearance of zending school, the development of Chinese and teacher ordonnance. The focus of this research is to know the policy of Pakubuwana X in the educational field in Surakarta in 1893-1939. It analyzes the influence of Pakubuwana X's Policy toward the Islamic educational development in Surakarta dealing with Islamic Education today. The research method is descriptive, to describe the phenomenon, and to gain the point of view, to determine what part to analyze, and what kind of part to be revealed. The result of the research concludes that the policy of Pakubuwana X was classified into two factors. First, the policy deals with the Islamic education institution, and second, the policy which was not dealt with the establishment of educational institutions. The presence of Mambaul Ulum took a big effect on the development of Islamic education in Surakarta. It was seen by the appearance of Islamic scholars, religious teachers, religious officers, and the development of Islamic preaching.

Keywords: education, policy, adab

Abstrak

Kebijakan pendidikan Pakubuwana X di Surakarta tahun 1893-1939 sangat terkait dengan kondisi sosial politik saat itu, seperti lahirnya politik etis, munculnya sekolah *zending* (Kristen), pendirian sekolah Cina, dan lahirnya Ordonansi guru. Fokus penelitian berkisar untuk mengetahui kebijakan Pakubuwana X dalam bidang pendidikan di Surakarta tahun 1893 - 1939, menganalisis pengaruh kebijakan Pakubuwana X terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta serta relevansinya dengan pendidikan Islam hari ini. Metode penelitian sejarah dengan penggambaran mengenai suatu peristiwa di mana dan dari sudut mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan. Hasil penelitian, secara garis besar kebijakan pendidikan Pakubuwana X dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*: berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam dan *kedua*: kebijakan yang tidak terkait langsung dengan pendirian lembaga pendidikan. Kehadiran Madrasah *Mambaul Ulum* berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Surakarta dengan munculnya para ulama, guru agama, pejabat keagamaan serta berkembangnya dakwah dan syiar Islam.

Kata kunci: pendidikan, kebijakan, adab

Diserahkan: 27-06-2019 **Disetujui:** 28-02-2021. **Dipublikasikan:** 01-03-2021

Kutipan: Mulyanto, M., Saefuddin, D., Husaini, A., & Bachtiar, T. (2021). Kebijakan pendidikan Pakubuwana X dan pengaruhnya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta tahun 1893-1939. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1). doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.1977>

I. Pendahuluan

Awal abad XX terjadi perubahan besar kebijakan politik Pemerintah Hindia Belanda dari ekspansi kekuasaan, berubah dengan menerapkan *politik etis* atau biasa dikenal dengan politik balas budi. Dampak politik etis tersebut dalam bidang pendidikan adalah munculnya berbagai lembaga pendidikan.

Pada periode *politik etis* atau periode tahun 1900-an, terjadi perubahan-perubahan penting dalam konteks proyek pendidikan kolonial, baik dalam bentuk reorganisasi sekolah maupun pembukaan sekolah-sekolah baru. Reorganisasi seperti yang terjadi pada tiga *hoofdenschoolen* di Bandung, Magelang dan Probolinggo menjadi OSVIA (*Opleid-ingscholen voor Inlandsche A mbtenaren*) dengan tujuan menjadi lembaga pendidikan yang mencetak pejabat pribumi, masa belajarnya lima tahun dengan pengantar bahasa Belanda dan terbuka bagi sekolah dasar Eropa lepas dari status sosial, priayi atau rakyat biasa. Pada tahun 1900-1902 sekolah Dokter Jawa diubah dengan nama STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Arsten*). Sekolah kelas satu yang diubah menjadi HIS (*Hollandsch-Inlandsche School*) atau 'Sekolah Belanda-Pribumi' pada tahun 1914. Sebelumnya tahun 1908, Sekolah Kelas Dua diubah menjadi *Standaard-Scholen* atau Sekolah Standar yang diperuntukkan untuk menggeluti perdagangan. Sementara bagi masyarakat desa yang ingin tetap hidup di lingkungan desa disediakan sekolah desa dengan nama *desascholen* atau *volkscholen*.

Selain reorganisasi lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru seperti untuk orang Eropa ELS (*Europeeche Lager School*), sekolah tingkat menengah HBS (*Hogere Burgerschool*), MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Ondermene Middelbare School*) untuk melayani pendidikan tingkat menengah atas.

Selain itu, lahirnya sekolah-sekolah *zending* yang merupakan sekolah misi Kristen dalam bidang pendidikan dan juga sekolah-sekolah etnis Cina di luar sekolah Belanda tersebut. Sebagai contoh perkembangan sekolah *zending*, Sekolah Kelas Dua pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah swasta. Di antara yang berstatus swasta tersebut, 63 sekolah berasal dari aktivitas *zending*. Pada tahun 1900-an jumlah sekolah dari berbagai tingkatan yang diprakarsai oleh misi Kristen sebanyak 541 buah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mayoritas lembaga pendidikan tersebut terletak di wilayah Sulawesi Utara dan Sumatera Utara (Subhan, 2009).

juga lahir sekolah-sekolah etnis Cina seperti THHK (*Tiong Hoa Hwe Koan*), sebuah lembaga pendidikan khusus anak-anak Cina di Indonesia. Identitas kecinaan menjadi basis utama organisasi ini. Karena itu, sekolah ini mengimpor kurikulum, buku-buku teks, dan guru dari Cina dan Singapura dengan *konfusianisme* dan budaya Cina sebagai unsur utama pembelajaran. Sekolah ini mengalami perkembangan pesat dari hanya satu buah

pada tahun 1901 menjadi 541 pada tahun 1908 yang tersebar di seluruh wilayah Jawa. Dalam tempo kurang dari satu dasawarsa, komunitas Cina di Indonesia memiliki lebih dari 500 lembaga pendidikan yang didasarkan kepada identitas etnis (Subhan, 2009).

Selain politik etnis, sekolah zending, sekolah Cina, Belanda juga mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap guru agama Islam harus mendapatkan izin sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama Islam. Kebijakan ini terkenal dengan Ordonansi Guru tahun 1905 (Soebahar, 2013, hlm. 17).

Dengan latar belakang tersebut, kebijakan pendidikan Pakubuwana X di Surakarta tahun 1893-1939 menarik untuk di teliti sekaligus untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta pada saat itu.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan studi kebijakan pendidikan Islam sebelumnya, di antaranya; Muhammad Sirozi; *Politik kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Disertasi, 1998), Abdur Rahman Assegaf; *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-Proklamasi ke Reformasi* (2005), Husni Rahim; *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia* (2005), Azyumardi Azra; *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Dokumen, 1999), Abdul Rachman Saleh; *Pendidikan Agama dan Keagamaan* (2000), Karel A. Steenbrink; *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (1994).

Perbedaan dari penelitian-penelitian tentang kebijakan dalam bidang pendidikan sebelumnya bahwa penelitian ini mengungkap kebijakan pendidikan masa lalu serta pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Surakarta saat itu.

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui berbagai kebijakan Pakubuwana X dalam bidang pendidikan di Surakarta tahun 1893 – 1939. 2) Menganalisis dampak kebijakan Pakubuwana X dalam bidang pendidikan terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta tahun 1893 – 1939. 3) Menganalisis konsep reformasi pendidikan Islam Pakubuwana X dan relevansinya dengan konsep pendidikan Islam ideal zaman sekarang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian dikategorikan dalam penelitian dengan metode *historis*. Metode historis menurut Gootscholk adalah sebuah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik sumber) dengan menempuh cara itu disebut *historiografi* (Gottschalk, 1975, hlm. 32).

Pendekatan penelitian historis adalah penggambaran mengenai suatu peristiwa di mana dan dari sudut mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-

unsur mana yang diungkapkan. Termasuk segala kebijakan yang dilakukan oleh Pakubuwana X selama masa kekuasaannya tahun 1893-1939.

Karena bersifat deskriptif maka dalam penelitian ini, data diambil dari berbagai literatur kepustakaan, referensi, ensiklopedi, dokumen atau berbagai tulisan yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Selain sebagai sebuah penelitian deskriptif maka data lain diperlukan seperti meneliti subyek secara individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat (Nasir, 1988, hlm. 88).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data-data, baik arsip, buku, catatan-catatan lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang terkait langsung dengan kekuasaan Pakubuwana X terutama Arsip "Bubukanipun Badhe Adegung Pamulangan Ing Kagungan Dalem Masjid Agung", transliterasi Moh. Ardani (1983).

Dari data tersebut, dilakukan analisis untuk melihat berbagai kebijakan Pakubuwana X serta mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Surakarta. Dari analisis ini, dapat diambil kesimpulan tentang kebijakan-kebijakan Pakubuwana X terkait pendidikan di Surakarta tahun 1893-1939 serta pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam dan syiar serta dakwah Islam di Surakarta.

III. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan adalah segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah.

Muhammad Sirozi menegaskan kebijakan adalah kompromi politik yang dinamis dan interaktif, satu penyelesaian di antara kepentingan yang saling bersaing. Mengutip pendapat Tailor, Sirozi menyebutkan bahwa kebijakan adalah dinamis dan interaktif, dan bukan hanya seperangkat suruhan atau niat. Kebijakan merupakan kompromi politik antara citra yang bertentangan bagaimana seharusnya perubahan pendidikan harus berjalan. Kata-kata yang dipakai dalam kebijakan dipilih dengan cermat dan banyak diperbaiki sesuai dengan keberatan yang diajukan berbagai kelompok kepentingan (Sirozi, 2004, hlm. 2).

Dalam ini, kebijakan pendidikan Pakubuwana X secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*; berkenaan dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Kedua*; lahirnya lembaga-lembaga pendidikan umum. *Ketiga*; kebijakan yang tidak terkait langsung dengan lembaga pendidikan tetapi bermuara untuk peningkatan dan pengembangan pendidikan masyarakat.

Di antara lembaga pendidikan Islam yang lahir pada masa pemerintahan Pakubuwana X adalah; 1) berdirinya Madrasah *Mambaul Ulum*, 2) menghidupkan kembali Pesantren Jamsaren, dan 3) berdirinya sekolah anak yatim, dan 4) Madrasah Sar'iyah.

Sedangkan lembaga pendidikan umum yang didirikan oleh Pakubuwana X adalah; 1) mendirikan sekolah taman kanak-kanak yang diperuntukkan putra dan putri serta cucu raja dengan nama *Pamardi Siwi*, 2) mendirikan sekolah khusus wanita, anak, cucu dan sentana setingkat HIS pada masa Belanda dengan nama *Pamardi Putri*, 3) mendirikan sekolah dasar 6 tahun dengan nama *H.I.S. Kasatriyan*, dan 4) mendirikan sekolah rakyat *Ongko Loro*, 5) mendirikan sekolah pertanian di Tegalgondo, Delanggu, Klaten.

Adapun kebijakan yang tidak terkait langsung dengan pendirian lembaga pendidikan tetapi bermuara untuk pengembangan pendidikan bagi masyarakat seperti; 1) beasiswa pendidikan untuk belajar ke Timur Tengah, khususnya ke Mesir, 2) penyediaan guru-guru agama, 3) penyediaan tenaga-tenaga penyiur agama (dai), dan 4) upaya peningkatan syiar dan pengamalan Islam di tengah-tengah masyarakat keraton Surakarta.

A. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan Islam

Pertama: Mendirikan Madrasah Mambaul Ulum pada hari Ahad tanggal 20 Jumadil Awal tahun Alif 1835 (tahun Jawa) (Ardani, 1983), jam 9 pagi atau bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1905. Mambaul Ulum berarti '*sumber kawruh*' atau sumber ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah tempat orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menimba ilmu di Mambaul Ulum. Pembangunan gedungnya baru selesai sepuluh tahun kemudian yaitu pada tanggal 20 Februari 1915 atau 11 Rabiul Awal 1845 dengan jumlah murid 448 siswa (Adnan, 1996, hlm. 15). Sedangkan surat ijin dari Gubernur Jenderal Belanda baru keluar pada tanggal 6 Maret 1906 (Ardani, 1983).

Latar belakang berdirinya Mambaul Ulum adalah; *pertama*; kedudukan Sunan Pakubuwana X sebagai *Panatagama*. Ini sesuai dengan gelar Raja Kasunanan Surakarta Sayidin Panatagama Khalifatullah yang artinya sebagai kepala pengatur agama dan khalifah Allah (Adnan, 1996, hlm. 13), di mana sebagai *Panatagama*, Raja keberatan jika rakyatnya memeluk selain Islam. Sebagai pemimpin tertinggi agama, ia tidak senang dengan maraknya sekolah-sekolah *zending* di wilayah Surakarta, karena itu, pendirian Mambaul Ulum sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan agama Kristen di wilayah Kasunanan.

Kedua; adanya modernisasi pendidikan Islam. Madrasah *Mambaul Ulum* merupakan pendidikan Islam pertama yang semula dari lingkup pesantren beralih ke madrasah. Di dunia pesantren terkenal dengan elemen-elemen pokok dari suatu pesantren yaitu; pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai. Kelima macam elemen tersebut merupakan pilar-pilar dari suatu pesantren. Pada sistem madrasah tidak mesti ada pondok, masjid, dan pengajian kitab-kitab klasik. Elemen-elemen yang diutamakan di madrasah adalah adanya lokal tempat belajar, guru, siswa, dan rencana pembelajaran, pimpinan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sistem madrasah mirip dengan sistem sekolah umum di Indonesia. Para siswa tidak mesti tinggal mondok di

kompleks madrasah, siswa cukup datang ke madrasah pada jam-jam berlangsung pelajaran pada pagi hari atau sore hari. Demikian juga tidak mesti ada masjid di lingkungan madrasah, walaupun siswa bermaksud melaksanakan salat, mereka melaksanakannya di musala. Pengajian kitab klasik pun tidak diadakan di madrasah. Pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan tercantum dalam daftar pelajaran yang diuraikan dari kurikulumnya (Daulay, 2009, hlm. 94-95).

Ketiga; kesadaran akan sumber daya manusia yang berdasarkan nilai Islam yang menuntut tersedianya pejabat agama yang cakap dan ahli di bidangnya (Nurhayati, 2010).

Madrasah *Mambaul Ulum* mengalami kemunduran pada masa Pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945 yaitu terjadi kevakuman karena tidak ada kegiatan belajar mengajar. Banyak kiai dan santri yang keluar untuk berperang, sehingga sekolah dalam keadaan kosong dan tidak terurus.

Kiai dan santri Madrasah *Mambaul Ulum* banyak yang menjadi anggota *sabilillah* dan *hizbullah* maju di garis depan melawan penjajah. Bahkan, ketika Belanda masuk kembali ke tanah air, Madrasah Mambaul Ulum menjadi kosong karena kiai, santri dan murid-muridnya keluar untuk bergerilya di dalam dan di luar kota, sampai masa berakhirnya pendudukan tentara Belanda di Indonesia (Nurhayati, 2010).

Mambaul Ulum ditutup ketika Belanda memasuki Surakarta pada tahun 1949 dan menduduki gedung Mambaul Ulum. Setelah Kementerian Agama mendirikan S.G.H.A dan P.G.A. pada beberapa daerah seluruh Indonesia, maka di gedung Manbaul Ulum didirikan P.G.A. Negeri sampai tahun 1959 (Yunus, 1996, hlm. 288).

Kedua: Menghidupkan kembali Pesantren Jamsaren. Pesantren Jamsaren adalah pesantren tertua di tanah Jawa. Secara umum, sejarah berdirinya melalui dua fase. Fase pertama adalah sekitar tahun 1750 M. Pada fase ini, Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana IV yang bergelar *Sunan Wali*. Kondisi masyarakat Surakarta saat itu masih dipenuhi dengan adat istiadat Hindu dan aliran-aliran animisme. Berbagai kemaksiatan dan kejahatan merajalela di berbagai kampung dan desa di Surakarta.

Untuk mengatasi tersebut, Pakubuwana IV mendatangkan para ulama di Surakarta. Di antara para ulama yang didatangkan tersebut adalah Kiai Jamsari dari Banyumas, yang kemudian setelah berada di Surakarta di tempatkan di barat daya dari istana Surakarta.

Kiai Jamsari mendirikan masjid, surau dan mengajarkan agama Islam seperti ilmu tauhid, bacaan Al Qur'an, syariat Islam kepada masyarakat umum, para bangsawan dan para pejabat istana. Ajaran-ajaran tersebut dapat diterima dengan baik dan akhirnya berkembang ke berbagai daerah di Surakarta dan sekitarnya. Kampung kediaman Kiai Jamsari akhirnya dikenal dengan kampung Jamsaren –sampai sekarang-. Sementara kemaksiatan, kejahatan di Surakarta berkurang yang menjadikan Surakarta aman dan

sejahtera. Keadaan tersebut berjalan sampai Kiai Jamsari wafat dan digantikan putranya Kiai Jamsari II (Darokah, 1983, hlm. 2).

Sampai sekitar tahun 1800 M keadaan tersebut berjalan dengan baik hingga masa Pakubuwana VI yang bergelar *Sunan Banguntopo*. Pada Masa Pakubuwana VI ini terjadi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro dibantu Pakubuwana VI melakukan perlawanan terhadap Belanda di daerah Magelang, Kartasura, Salatiga dan Semarang. Para Kiai, ulama dan santri turut serta membantu Pangeran Diponegoro. Pada masa awal peperangan, Belanda banyak mengalami berbagai kekalahan, namun dengan berbagai muslihat, akhirnya Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dan dibuang di Makassar, Sulawesi Selatan. Kiai Mojo ditangkap dan dibuang di Banda, Aceh. Sedangkan Pakubuwana VI berhasil ditangkap di Klaten dan dibuat di Ambon, Maluku Selatan sampai meninggalnya.

Sementara Kiai Jamsari II juga keluar bersama santri-santrinya dan tidak ditemukan oleh Belanda keberadaannya. Semenjak saat itu, pesantren Jamsaren kosong dan tidak terurus sampai datangnya Kiai Idris. Kiai Idris yang meneruskan Pondok Pesantren Jamsaren setelah Vakum sekitar 50 tahun. Ia berasal dari Klaten, keturunan Kiai Imam Rozi, bekas seorang pembantu Pangeran Diponegoro (Darokah, 1983, hlm. 3). Semakin ramai dan berjalan kembali pada masa Pakubuwana X dengan didirikannya Mambaul Ulum.

Fase kedua sejarah Jamsaren adalah sekitar tahun 1878 M dengan kedatangan Kiai Idris yang membuka pengajian di Kampung Jamsaren. Dengan mendirikan musala, Kiai Idris mengajarkan Al Qur'an dan kitab-kitab Islam berbahasa Arab yang diterjemahkan dengan Jawa *pegon* (bahasa Jawa yang disesuaikan dengan susunan Bahasa Arab). Dari kitab-kitab kecil sampai kitab-kitab yang besar seperti ilmu Nahwu mulai *Jurumiyah* sampai *Alfiyah* dan *Syarah Ibnu Aqil*. Ilmu Sharaf mulai dari *Kitab Bina'* sampai *Kitab Marakul Arwah* dan *Kitab Syafiyah*. Ilmu Fiqh mulai *Kitab Safinah* sampai *Kitab Fathul Mu'in* dan *Fatuhul Wahab*, dan sebagainya (Darokah, 1983, hlm. 3).

Pesantren Jamsaren tampak hidup kembali pada masa Pakubuwana X saat didirikan Mambaul Ulum. Siswa-siswanya ketika pagi bersekolah di Mambaul Ulum, sore harinya mereka berada di asrama yaitu Pondok Pesantren Jamsaren. Selain itu, Kepala Mambaul Ulum, Kiai Idris sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Jamsaren.

Ketiga: Mendirikan sekolah Tarbiyatul Aitam dan Madrasah Sar'iya. Pakubuwana X juga mendirikan sekolah *Tarbiyatul Aitam* dan *Madrasah Sar'iya*. Sekolah Tarbiyatul Aitam merupakan perubahan dari sekolah *Bawa Leksana* pada tahun 1919 yang sebelumnya didirikan untuk memberikan pelajaran tentang tata cara berpakaian yang pantas, bersopan santun, bahasa Jawa dan pelajaran agama Islam bagi anak-anak Kauman (Nurhayati, 2010).

Tarbiyatu Aitam adalah sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak yatim. Berasal dari kata *tarbiyah* yang artinya pendidikan dan *aitam* yang artinya anak yatim piatu. Jadi *Tarbiyatul Aitam* adalah sekolah pendidikan bagi anak-anak yatim piatu.

Tarbiyataul Aitam merupakan sekolah umum seperti sekolah dasar. Namun demikian, sekolah ini memberikan tambahan sore hari bagi anak-anak sekolah *Ongko Loro* (*volkschool*). Mata pelajaran yang diajarkan berupa menulis, membaca huruf Arab, pelajaran salat, hukum-hukum Islam serta menjadi tempat pembelajaran Al Qur'an (Nurhayati, 2010).

Selain mendirikan *Tarbiyatul Aitam*, Pakubuwana X juga mendirikan sekolah untuk mendidik anak-anak Kauman tentang pelajaran agama Islam yang diberi nama *Madrasah Sar'iyah*. Seperti halnya *Tarbiyatul Aitam*, *Madrasah Sar'iyah* merupakan sekolah Mambaul Ulum untuk wanita. Sekolah tersebut pada dasarnya atas kehendak dan bantuan KRTP Tafsir Anom V. Pengajar dan guru diambilkan dari alim ulama masjid atau penghulu dan anggotanya (Nurhayati, 2010).

B. Pengaruh Kebijakan Pakubuwana X terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Surakarta Tahun 1893-1939

Pembukaan *Madrasah Mambaul Ulum* oleh Pakubuwana X mendapat respons besar umat Islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya umat Islam yang belajar di *Mambaul Ulum*. Untuk mengatasi tersebut dibukalah kelas sore sekitar tahun 1925. Sehingga jumlah murid pagi dan sore kurang lebih 700 siswa. Karena jumlah yang banyak tersebut, maka Pondok Pesantren Jamsaren digunakan sebagai asrama siswanya. Di berbagai kabupaten kekuasaan Pakubuwana X juga dibuka *Madrasah Mambaul Ulum* sampai kelas IV. Setelah tamat, mereka melanjutkan sekolah *Mambaul Ulum* di Surakarta. Di antara kabupaten yang dibuka sekolah *Mambaul Ulum* tersebut adalah: Klaten, Sragen, Boyolali, Wonogiri, Surakarta, Kartasura dan Sukoharjo (Nurhayati, 2010, 125).

Pembukaan pesantren Jamsaren menjadi spirit baru bagi pendidikan Islam di Surakarta. Apalagi, setelah hampir lebih dari 75 tahun (1830 – 1905) *vakum* tidak ada aktivitas pembelajaran setelah para kiai dan muridnya terlibat dalam perang Diponegoro. Pembukaan Pesantren selain menjadi spirit bangkitnya pendidikan Islam di Surakarta khususnya, sekaligus memompa semangat belajar agama Islam di Surakarta.

Di daerah-daerah Pakubuwana X mendirikan masjid. Selain sebagai tempat ibadah dan berbagai peringatan hari besar Islam, masjid-masjid tersebut digunakan untuk mengajarkan baca tulis Al Qur'an kepada umat Islam di wilayah Surakarta. Di antara masjid-masjid yang didirikan pada masa Pakubuwana X adalah di lingkungan keraton didirikan masjid Pudjosono, sementara di luar keraton didirikan masjid Suronatan, Pengging, Boyolali, Manang, Kedung Gudel dan Langenharjo (Adnan, 1996, hlm. 23).

Pendidikan bagi *abdi dalem Pamethakan* dan keturunannya terus dididik untuk memahami Islam. Hasil pendidikan tersebut dijadikan standar sebagai perilaku anggota

masyarakat yang lain. Para *abdi dalem* tersebut kemudian menjadi sumber daya dalam semua aktivitas keagamaan yang diadakan di dalam keraton. Mereka juga berfungsi sebagai individu-individu yang menjadi teladan dalam perilakunya bagi masyarakat secara luas (Nurhayati, 2010, hlm. 137-138).

Tafsir Anom V berperan mengajarkan dan memberi pengetahuan tentang agama Islam kepada Pakubuwana X. Pada masa Pakubuwana X, syiar Islam berkembang dengan baik. Di antara upaya tersebut adalah mengadakan pengajian secara rutin setiap tanggal 15 bulan Purnama (*Qomariyah*). Pengajian tersebut diisi oleh para ulama yang didatangkan dari berbagai daerah. Berbagai hasil ceramah dari berbagai ulama tersebut kemudian ditulis dan dijadikan sebagai majalah yang kemudian dibagikan kepada jamaah pengajian selanjutnya. Majalah tersebut diberi nama *Hudaya* yang berarti petunjuk dari Allah (Nurhayati, 2010, hlm. 138).

Disisi lain, ijazah yang dikeluarkan Mambaul Ulum menjadikan lulusannya sebagai tolak ukur kecakapan para ulama keraton saat itu, baik secara keilmuan maupun secara akhlak. Mereka yang mengajarkan Islam di tengah-tengah masyarakat Surakarta.

Di antara pendidikan yang aktivitas pengajarannya dikembangkan di rumah-rumah adalah yang dilakukan oleh alumni Mambaul Ulum dan Pesantren Jamsaren. Di antara lulusannya tercatat sebagai pemimpin masyarakat, guru madrasah, kiai pesantren, pejabat pemerintah, penghulu hakim, kepala pengadilan agama, pejabat-pejabat tinggi dalam kementerian dan lainnya (Nurhayati, 2010).

Tafsir Anom V membuka sekolah-sekolah agama, baik di rumah sendiri atau di langgar. Tafsir Anom V juga membuka di pendopo rumahnya serta mendirikan bangunan sekolah di sebelah timur rumahnya (sekarang TK NDM Kauman). Saat itu, sekolah hanya untuk kaum duafa yang berkeinginan untuk belajar.

Kesadaran belajar dan beragama tinggi. Hal ini tidak lepas dari lulusan-lulusan Mambaul Ulum yang menghasilkan lulusan yang memadai dan mampu mengembangkan anak didiknya dengan ilmu yang diperolehnya. Mereka ahli membaca, mensyarah kitab-kitab fiqh, tafsir, hadits, tauhid, nahwu dan shorof. Penguasaan terhadap kitab-kitab tersebut menjadikan murid-muridnya mampu menangkap semangat ajaran Islam secara menyeluruh yang kemudian dikembangkan sendiri masing-masing alumni tersebut (Ardani, 2007).

Berkat kesadaran penguasaan ilmu agama yang baik berdampak tumbuhnya kesadaran beragama tinggi. Para alumni mampu menangkap semangat ajaran Islam, memiliki akhlak yang baik, dan mampu memahami bahkan pengajaran yang diperolehnya bukan sekedar sebagai ilmu pengetahuan, tetapi untuk diamalkan. Mereka memahami dengan penguasaannya terhadap kitab-kitab tersebut akan mempertinggi akhlak serta rasa taat dan takwa kepada Allah SWT (Ardani, 2007, hlm. 26).

Kualitas lulusan yang baik tersebut menjadikan mereka mudah diterima masyarakat untuk mengajarkan Islam di tengah-tengah mereka. Bahkan masyarakat memberikan penghargaan yang tinggi. Tidak sedikit di antara mereka yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, menjadi mubalig, guru dan penyuluh agama.

Siti Nurhayati mengutip pendapat Clifford Geertz dalam *'Santri dan Abangan di Jawa'* menyebutkan bahwa kesadaran pendidikan agama di Surakarta pada masa Pakubuwana X menunjukkan semakin kuatnya ciri keagamaan Islam. Norma-norma kesetiaan sangat ditekankan, hasil-hasil kesusastraan dan kebudayaan Islam diberikan dan diajarkan kepada rakyatnya. Keraton Kasunanan sebagai pusat pemerintahan bagi keraton, berawal dari dalam keraton rakyat dapat mengikuti berbagai kegiatan keagamaan. Penghulu Keraton mengajarkan salat, puasa, serta menjalankan rukun Islam, kewajiban untuk mengislamkan anak laki-laki dan pendidikan tentang agama. Kondisi keagamaan pada masa ini berkembang dan maju. Dengan berlandaskan Al Qur'an dan Hadits, para ulama menyusun syariat yang merupakan hukum Islam (Nurhayati, 2010).

Dampak langsung dari pendidikan Mambaul Ulum dan Pesantren Jamsaren adalah tersedianya pengajar agama Islam. Secara otomatis berpengaruh terhadap syiar Islam di wilayah Surakarta. Pakubuwana X memerintahkan agar khotbah Jumat diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan Arab yang sebelumnya khotbah Jumat memakai bahasa Arab. Hal ini dimulai pada tanggal 27 Sura tahun Dal 1832 Jawa. Dipasang pula pengeras suara, dan langsung disiarkan oleh radio SRI (Siaran Radio Indonesia) milik Kasunanan dengan penyiar terkenal saat itu R.M. Moelyadi Joyomartono (Adnan, 1996, hlm. 15).

Pengajian-pengajian digalakkan. Di antaranya adalah pengajian secara rutin setiap tanggal 15 bulan Purnama (*Qomariyah*). Pengajian tersebut diisi oleh para ulama yang didatangkan dari berbagai daerah. Berbagai hasil ceramah dari berbagai ulama tersebut kemudian ditulis dan dijadikan sebagai majalah yang kemudian dibagikan kepada jamaah pengajian selanjutnya. Majalah tersebut diberi nama *Hudaya* yang berarti petunjuk dari Allah (Nurhayati, 2010).

Secara otomatis, kemajuan pendidikan berdampak langsung terhadap semaraknya syiar Islam di wilayah Surakarta. Masjid-masjid ramai orang-orang belajar membaca Al Qur'an. Guru-guru lulusan Mambaul Ulum dan Pesantren Jamsaren dianggap mumpuni untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga mereka menjadi kepercayaan masyarakat untuk menjawab berbagai problem keagamaan yang timbul.

Pengaruh lain adalah semakin maraknya perkembangan syiar Islam di Surakarta dengan Kauman sebagai pusat ulama yang berperan sebagai juru dakwah dan penyebaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, sekolah Islam dan acara-acara besar Islam di Kauman sampai tahun 1930 terus berlangsung dan masih eksis. Kegiatan pengajian diselenggarakan ulama-ulama

lulusan Mambaul Ulum yang berlangsung di Kauman seperti pengajian di Langgar Winongan, Langgar Gontoran dan Langgar Sememen (Nurhayati, 2010).

Di kota-kota dan desa-desa di Surakarta mengalami perkembangan dalam pengamalan Islam. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah orang salat berjamaah di Masjid Agung, misalnya salat Jumat, Dhuhur dan Ashar jumlah jamaah semakin ramai. Peningkatan jamaah karena adanya daya tarik murid-murid yang belajar di Madrasah Mambaul Ulum yang melaksanakan salat jamaah di Masjid Agung pada waktu Dhuhur dan Ashar. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengikuti salat berjamaah di masjid tersebut (Nurhayati, 2010, hlm. 147).

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan Pakubuwana X dan pengaruhnya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta tahun 1893-1939, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai kebijakan pendidikan Pakubuwana X berpengaruh besar terhadap pengembangan pendidikan Islam di Surakarta tahun 1893-1939.

Kebijakan-kebijakan Pakubuwana X dalam bidang pendidikan Islam seperti; 1) mendirikan Madrasah *Mambaul Ulum*, 2) menghidupkan kembali Pesantren Jamsaren, dan 3) berdirinya sekolah anak yatim, dan 4) Madrasah Sar'iyah. Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak terkait langsung dengan pendirian lembaga pendidikan seperti: 1) beasiswa pendidikan untuk belajar ke Timur Tengah, khususnya ke Mesir, 2) penyediaan guru-guru agama, 3) penyediaan tenaga-tenaga penyiara agama (dai), dan 4) upaya peningkatan syiar dan pengamalan Islam di tengah-tengah masyarakat keraton Surakarta.

Kehadiran Madrasah *Mambaul Ulum* berdampak terhadap perkembangan pendidikan Islam di Surakarta. Hal ini dengan hadirnya para ulama, guru agama, pejabat keagamaan serta berkembangnya dakwah dan syiar Islam di Surakarta dan sekitarnya yang berasal dari lulusan Madrasah *Mambaul Ulum* tersebut.

Keberadaan Madrasah *Mambaul Ulum* dan Pesantren Jamsaren sangat berpengaruh terhadap tokoh-tokoh keagamaan. Lulusan Mambaul Ulum dan Jamsaren mampu menduduki jabatan-jabatan strategis, sebagai guru agama, penyuluh keagamaan maupun pemegang jabatan di Keraton Surakarta. Di antara klasifikasi lulusan berkaitan dengan jabatan yang dipegang adalah jabatan modin atau jajar, penghulu naib, penghulu agama Kabupaten atau Penghulu Pengadilan Negeri (*Landraad*).

Pengaruh langsung dari kebijakan Pakubuwana X adalah tersedianya pengajar agama Islam. Secara otomatis berpengaruh terhadap syiar Islam di wilayah Surakarta. Pengajian-pengajian digalakkan. Masjid-masjid ramai orang-orang belajar membaca Al-Qur'an. Guru-guru lulusan Madrasah *Mambaul Ulum* dan Pesantren Jamsaren dianggap

mumpuni untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga mereka menjadi kepercayaan masyarakat untuk menjawab berbagai problem keagamaan yang timbul.

Relevansinya dengan pendidikan Islam sekarang adalah, alumni Madrasah *Mambaul Ulum* mampu mendapatkan kepercayaan tinggi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi teladan di tengah-tengah mereka. Hal ini disebabkan karena akhlak dan adab yang luhur yang mereka tampilkan di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adnan, H.A. Basit, *Sejarah Masjid Agung dan Gamelan Sekaten di Surakarta*, Surakarta: Adnan, H. A. B. (1996). *Sejarah Masjid Agung dan Gamelan Sekaten di Surakarta*. Yayasan Mardikintoko.
- Ardani, M. (1983). *Agama dan Perubahan Sosial di Indonesia: Mamba'ul Ulum Kasunanan Surakarta 1905-1942, Studi Kasus*.
- Ardani, M. (2007). Peran Karaton Dalam Pengembangan Budaya dan Pendidikan Islam. Dalam *Peran Karaton dalam Pengembangan Islam*.
- Assegaf, A. R. (2005). *Politik Pendidikan Nasional*. Kurnia Salam.
- Azra, A., & Yatim, B. (2000). *Sejarah perkembangan madrasah*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Darokah, A. (1983). *Pondok Pesantren Jamsaren Solo dalam Historis dan Esensinya*. Ramadhani.
- Daulay, H. P. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S. (2010). *Mambaul Ulum dalam Peningkatan Pengamalan dan Syiar Islam, Dinamika Pendidikan Islam dalam Mencetak Ulama di Surakarta Tahun (1905-1945)*. UNS.
- Rahim, H. (2005). *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Logos.
- Saleh, A. R. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan*. PT Gema Windu Penca Perkasa.
- Sirozi, M. (2004). *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. INIS.
- Soebahar, A. H. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*. Rajagrafindo.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. LP3ES.
- Subhan, A. (2009). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*. UIN Jakarta.
- Yunus, M. (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung.